

IKHTISAR

Hermawan: Perburuan Satwa Yang Dilindungi Dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang no. 5 Tahun 1990 Perspektif Fiqih Jinayah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dengan yang namanya makanan dalam mempertahankan hidupnya, khususnya yang berkenaan dengan asupan gizi dalam hal ini protein hewani. Protein hewani tentu saja dapat diperoleh dari sumberdaya hewani.

Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia dalam masyarakat, Dapat diketahui bahwa manusia secara kodrati hidup berkelompok (*bermasyarakat*). Dalam bermasyarakat, manusia mengadakan interaksi satu sama lainnya. Selain berinteraksi dengan manusia lainnya, manusia juga berinteraksi dengan alam sekitarnya. Untuk menjaga keseimbangan alam sekitarnya, manusia bertanggungjawab menjaga agar keseimbangan alam tetap terjaga.

Berdasarkan latar belakang di atas diajukan dua pertanyaan penelitian yaitu: bagaimana perburuan satwa yang dilindungi Negara dalam pasal 21 ayat (2) undang-undang no. 5 tahun 1990. Dan bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap perburuan satwa yang dilindungi Negara dalam pasal 21 ayat (2) undang-undang no. 5 tahun 1990.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam pasal 21 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990. Untuk mengetahui tinjauan fiqh Jinayah terhadap tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi dalam pasal 21 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990.

Penelitian ini menggunakan metode konten analisis dengan melihat teks-teks yang terkandung dalam undang-undang dengan adanya data-data dan dokumen-dokumen. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif di mana data tersebut tidak menggunakan angka-angka. Sumber data primer adalah bahan-bahan yang mengikat yaitu undang-undang dan bahan data skunder terdiri dari buku-buku penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan data primer. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tehnik kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan perburuan satwa yang dilindungi merupakan jarimah, karena segala hal yang terjadi menjadi unsur-unsur dalam kejahatan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi. Tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi termasuk kedalam kategori jarimah ta'zir. Sanksinya adalah berupa hukuman penjara terbatas (*al-habsu mu'tamadi*) dan hukuman denda. Jelas adanya relevansi antara hukum positif dengan hukum pidana Islam, yang menjadi perbedaan adalah dalam hukum positif menjadi hukuman pokok sedangkan dalam hukum pidana Islam sebagai hukuman alternatif